

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1. Latar Belakang

Semenjak dibentuk sebagai ilmu yang mapan pada tahun 1919 di Universitas Aberystwyth di Wales setelah berakhirnya Perang Dunia I, ilmu hubungan internasional dibentuk atas dasar untuk mengamati dan meneliti dinamika hubungan antar negara di suatu sistem internasional. Ilmu hubungan internasional juga telah melalui berbagai perdebatan besar antara pemahaman dari satu sisi dengan sisi lainnya. Perdebatan besar ini sering dikenal sebagai *great debates*. Salah satu perdebatan yang ada adalah mengenai pandangan antara rasionalisme vs. reflektivisme (atau juga dikenal sebagai postivisme vs. pasca-positivisme). Sisi rasionalisme – termasuk paradigma-paradigma seperti liberalisme dan realisme – memiliki metodologi yang bersifat positif dan hanya membatasi hal-hal tertentu yang dapat dianalisis. Sementara di sisi reflektivisme – termasuk paradigma konstruktivisme – mengkritik pandangan kaum rasionalisme, dan lebih mendukung bentuk penelitian yang bersifat interpretatif dan subjektif, dan berpendapat bahwa nilai-nilai seperti aspek historis tidak dapat dipisahkan dari observasi (Benneyworth, 2011).

Penelitian ini akan melihat sisi *foreign policy* atau kebijakan luar negeri, dan mencoba untuk menjelaskan perspektif Korea Selatan secara reflektivisme atau pasca-positivisme dalam menjelaskan mementingkan aspek-aspek konstruksi sosial, dinamika kekuatan dan aspek historis dalam hubungan yang kompleks antara Korea Selatan dan Jepang. Hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang selalu diwarnai dengan ketegangan, terutamanya dalam aspek historis. Korea Selatan dan Jepang memiliki sejarah kolonialisme dan imperialisme yang kental, yang dimulai sejak tahun 1895 di mana Jepang mengalahkan Kekaisaran Qing dan mengambil alih Semenanjung Korea ke dalam *sphere of influence* atau lingkaran pengaruh bagi Jepang, yang kemudian berujung terhadap keseluruhan dari Korea dianeksasi pada tahun 1910. Pemerintah pendudukan Jepang di Korea telah melakukan berbagai kejahatan perang, termasuk pelecehan seksual terhadap perempuan Korea dalam bentuk *comfort women*, kerja buruh paksa, dan juga kekerasan terhadap kelompok oposisi pro-kemerdekaan. (Kimura, 2019).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Korea, Semenanjung Korea yang dulunya di bawah penjajahan Jepang kini terbagi menjadi dua negara, salah satunya adalah Korea Selatan yang dipimpin di bawah diktator militer Park Chung-hee. Pada rezim Park, Korea Selatan dan Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Eisaku Sato menyetujui untuk menormalisasi hubungan antara kedua negara tersebut dengan penandatanganan Perjanjian Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea pada tahun 1965. Salah satu klausul dari perjanjian tersebut adalah pembayaran ganti rugi Jepang kepada Korea Selatan sebesar AS\$300 juta dalam bentuk dana hibah, dan AS\$200 juta dalam bentuk pinjaman yang diselesaikan dalam waktu sepuluh tahun. Ganti rugi ini ditujukan untuk membayar rugi kerusakan material dalam bentuk infrastruktur dan tidak mencakup kerugian pribadi yang disebabkan oleh kejahatan perang Jepang (Ju, 2020).

Presiden Park menjustifikasi tindakan ini untuk menguatkan ekonomi Korea Selatan mirip seperti Jepang pada zaman Meiji dengan slogan *fukoku kyouhei* atau negara kaya, tentara kuat). Ditambah dengan mengurangnya bantuan dana dari Amerika Serikat dan ketidakmampuan pemerintah Korea Selatan untuk meminta bantuan pinjaman luar negeri, Park dan Menteri Luar Negeri Lee Tong-won menyetujui bahwa Korea Selatan harus mulai melakukan diplomasi untuk mencapai stabilitas ekonomi domestik, termasuk dengan Jepang (Vogel & Kim, 2013).

Setelah tumbang rezim otoriter Park Chung-hee, Korea Selatan mulai mengalami gelombang demokratisasi. Setelah munculnya demokratisasi ini, khalayak domestiknya mendorong pemerintah Korea Selatan untuk meminta Jepang membayar ganti rugi korban penjajahan. Menurut Kimura, ada tiga faktor yang memengaruhi politisasi isu historis dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang: bangkitnya banyak aktor politik di Korea Selatan, terbentuknya perspektif baru terhadap isu-isu sejarah, dan eksistensi dari adanya keuntungan dari membangun kontroversi domestik dan internasional. Ketiga faktor ini juga dipengaruhi oleh gerakan demokratisasi in Korea Selatan pada tahun 1980-an, dan kejatuhannya dominasi Jepang secara ekonomis. Isu-isu historis Jepang, atau ini telah dipolitisasi oleh kalangan *interest groups* di Korea Selatan untuk mengalih isu domestik tertentu atau untuk meraih dukungan elektoral (Kimura, 2019; Koga, 2023).

Meskipun dengan terpolitisasinya isu historis dalam politik domestik Korea Selatan, Seoul dan Tokyo telah berupaya untuk memperbaiki hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dalam segi historis. Pada masa pemerintahan Park Geun-hye – presiden dari Partai Saenuri yang konservatif (kemudian berubah nama menjadi Partai Kekuatan Rakyat (PPP)) – pemerintah Korea Selatan dengan sukses bernegosiasi dengan Jepang di bawah

Perdana Menteri Shinzo Abe untuk menyelesaikan isu *comfort women*. Jepang menyetujui untuk memberikan biaya ganti rugi sebesar satu miliar Yen Jepang pada tahun 2015 kepada korban-korban tersebut. Mayoritas dari setelah terjadinya kasus korupsi dan pemakzulan Presiden Park, persetujuan isu *comfort women* tersebut dibatalkan oleh pemerintahan Moon Jae-in dari Partai Demokrat yang berhaluan liberal (Hendarjat & Paksi, 2022).

Pada zaman Moon Jae-in, hubungan antara Jepang dan Korea Selatan mengalami penurunan setelah keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada tahun 2018 yang meminta perusahaan Mitsubishi Heavy Industries untuk membayar kompensasi sebesar 150 juta Won Korea Selatan kepada lima korban pekerja paksa pada zaman penjajahan Jepang. Pemerintah Jepang mengkritik tindakan ini, yang menganggap agenda ganti rugi masa penjajahan telah diselesaikan berdasarkan Perjanjian Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea 1965 (Sang-Hun, 2018). Pada tahun 2019, Jepang membalas dengan menghapus Korea Selatan dari daftar *whitelist* mitra dagang, dan membatasi ekspor bahan kimia strategis yang berkaitan dengan produksi semikonduktor dan layar LCD. Tindakan ini memulai perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan (Hendarjat & Paksi, 2022). Korea Selatan membalas dengan membatasi angka impor hasil perikanan dan pertanian dari Fukushima dan membawa kasus tersebut ke World Trade Organization (WTO) (Miles, 2019).

Dalam aspek kerja sama pertahanan, Korea Selatan membalas dengan mengumumkan pembatalan perjanjian General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dengan Jepang pada tanggal 22 Agustus. Perjanjian keamanan yang ditandatangani pada tahun 2016 ini bertujuan untuk saling menukar informasi sensitif mengenai ancaman dari Korea Utara. Amerika Serikat menekan Seoul dan Tokyo untuk melanjutkan perjanjian keamanan tersebut, dan Korea Selatan menyetujui dan Presiden Moon pun membatalkan rencana tersebut (J. Lee & Takenaka, 2019).

Sengketa dagang ini menjadi titik rendah dalam hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. Di sisi masyarakat publik, rakyat Korea Selatan mengencarkan kampanye boikot terhadap produk-produk dari dan kunjungan pariwisata ke Jepang. Masyarakat Korea Selatan memboikot produk-produk dari Muji, Uniqlo, Toyota, Honda dan Nissan, serta membatalkan rencana mereka untuk berkunjung ke Jepang. Penjualan bir Jepang di Korea Selatan menurun sebesar 38% dan impor mobil Jepang mengalami penurunan sebesar 32% (H.-J. Kim, 2019). Pada waktu yang sama, Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO) melaporkan penurunan jumlah pengunjung dari Korea Selatan sebesar 48% pada bulan September 2019 sebesar 58% (Japan National Tourism

Organization, 2019). Sengketa dagang ini terus berjalan selama kepemimpinan Presiden Moon dan Partai Demokrat Korea.

Pemaparan pada awal dari latar belakang penelitian ini telah menunjukkan buruknya hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Mengenang kedua negara di Asia Timur ini adalah negara demokrasi dengan pendapatan yang tinggi, isu historis ini dan opini publik yang memandang Jepang secara negatif dari kacamata kolonialisme menjadi aspek pendorong utama mengapa Korea Selatan tidak ingin bekerja sama dengan Jepang dalam tingkat tinggi, seperti aspek pertahanan dan keamanan. Di tambah lagi, Korea Selatan juga memiliki pandangan yang berbeda dengan Jepang dalam bagaimana mereka memandang Korea Utara dan Tiongkok. Contohnya, saat Korea Selatan memasang rudal anti-balistik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), pemerintahan Park Geun-hye secara langsung mengadakan konferensi tingkat tinggi di Hangzhou pada tanggal 5 September 2016 setelah Tiongkok mengecam pemasangan THAAD tersebut. Presiden Park Geun-hye menjelaskan kepada Presiden Xi Jinping bahwa pemasangan THAAD dilakukan demi pertahanan diri atau *self-defense* terhadap ancaman dari Korea Utara (Sang-ho, 2016).

Akan tetapi, saat pemerintah Park Geun-hye menyetujui rencana pemasangan THAAD pada tahun 2017, pemerintah Tiongkok membalas dengan menetapkan sanksi informal dan kampanye boikot. Pemerintah Tiongkok menutup sekitar 75 dari 99 supermarket Lotte dengan alasan “pelanggaran aturan keselamatan kebakaran.” Penjualan mobil merek Hyundai dan Kia Motors pada bulan Maret 2017 jatuh sebanyak 52 persen dari tahun sebelumnya, angka terendah sejak tahun 2014. Selain itu juga, turis asal Tiongkok pun jatuh sebanyak 39.4% dari tahun sebelumnya (Ge, 2017; Kyoung, 2017). Korea Tourism Organization melaporkan bahwa sektor pariwisata Korea Selatan mengalami kerugian sebesar AS\$6.5 miliar dengan mengurangnya pembelanjaan konsumen dari Tiongkok (C. Kim & Blanchard, 2017). Pemerintah Moon Jae-in pada bulan Oktober 2017 menyetujui untuk memperbaiki hubungan antara Seoul dan Beijing dengan memberikan janji *three noes*. Janji *three noes* tersebut adalah menjamin Tiongkok rudal THAAD tidak akan dipasang di Korea Selatan, Korea Selatan tidak akan bergabung dalam aliansi trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang, dan Korea Selatan tidak akan berpartisipasi dalam sistem pertahanan rudal regional (*regional military defense*) Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok menyetujui rencana ini, dan mengakhiri sanksi informal terhadap perusahaan Lotte pada bulan Mei 2019, dan alhasil Lotte mengalami kerugian sebesar AS\$1.7 miliar sejak bulan Januari 2017 hingga Juli 2018 di Tiongkok (J. Lee, 2019; Stangarone, 2019).

Respons dari pemerintahan Park Geun-hye dan Moon Jae-in terhadap sanksi informal dan boikot dari pemerintah Tiongkok menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak tertarik untuk melakukan *balancing* melawan Tiongkok dikarenakan ketergantungan ekonomi yang kuat, kapabilitas militer yang lebih kuat, serta kemampuannya untuk memengaruhi Korea Utara yang dibutuhkan Korea Selatan. Sementara, Jepang dengan kondisi ekonominya yang tidak terlalu bergantung kepada Tiongkok, serta letak geografisnya yang lebih jauh, memberikan kesempatan bagi Jepang untuk lebih bertindak proaktif terhadap Tiongkok yang dibantu dengan *power projection* Amerika Serikat melalui aliansinya dengan Washington (Koga, 2023).

Sementara dalam isu Korea Utara, meskipun Korea Selatan dan Jepang sama-sama khawatir akan potensi ancaman program senjata nuklir Pyongyang, ada kecenderungan pemerintah Korea Selatan di bawah periode kepemimpinan partai progresif masih tetap mengedepankan pendekatan diplomatik untuk mencapai reunifikasi Korea. Ini dikenal dalam kebijakan Sunshine Policy yang pertama kali dilaksanakan pada zaman pemerintahan Presiden Kim Dae-jung pada tahun 1998. Kebijakan Sunshine Policy ini sukses dalam menggaet konferensi tingkat tinggi pertama antara Korea Selatan dan Korea Utara pada bulan Juni 2000 dengan pemimpin Kim Jong-il. Seoul dan Pyongyang menyetujui untuk mengakhiri ketegangan dan mengakhiri status gencatan senjata dengan perjanjian damai yang permanen (Robinson, 2007). Sunshine Policy pada awal tahun 2000-an ini pun membawa Kawasan Industri Kaesong, sebagai rencana untuk memberikan peluang bagi perusahaan Korea Selatan untuk berinvestasi di Korea Utara. Namun, kebijakan Sunshine Policy ini pun berakhir sementara pada tahun 2010 di bawah pemerintahan Lee Myung-bak, setelah terjadinya insiden penenggelaman kapal ROKS Cheonan dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara (H. Park, 2024).

Sunshine Policy ini kemudian diaktifkan kembali dengan terpilihnya Presiden Moon Jae-in pada tahun 2017. Selain terjadinya atlet Korea Selatan dan Korea Utara bertanding bersama pada Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang pada tahun 2018, Presiden Moon dan Kim Jong-un mengadakan konferensi tingkat tinggi pada bulan April 2018, yang berujung terhadap ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom. Deklarasi ini bertujuan untuk mempromosikan dan bekerja sama dalam mencapai reunifikasi, mengakhiri perang secara resmi, dan denuklirisasi terhadap semenanjung Korea (H. Park, 2024).

Sebagai perbandingan, Jepang memandang Korea Utara sebagai ancaman militer di kawasan. Tes rudal roket Korea Utara yang selalu mendarat dalam perairan zona ekonomi eksklusif Jepang pada tahun 2017 dan 2022, serta kasus penculikan warga negara Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara hingga kini menjadi poin utama kekhawatiran Jepang. Selain itu, Jepang tidak memiliki situasi di mana isu keamanan Korea Utara dipandang sebagai isu yang partisan seperti Korea Selatan yang di mana kaum progresif cenderung mendukung normalisasi dibandingkan kaum konservatif yang ingin secara aktif merespons secara langsung terhadap Korea Utara melalui kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat dan Jepang (Haruki & McCormack, 2023; H. Park, 2024).

Pada pemilihan presiden tahun 2022, Jaksa Agung Yoon Suk-yeol dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berhaluan konservatif memenangkan pemilihan presiden di negara tersebut melawan Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, partai yang dipegang oleh mantan Presiden Moon. Presiden Yoon sendiri memiliki reputasi domestik sebagai politikus yang memiliki hubungan yang erat dengan gerakan politik sayap kanan *new right* (*sayap kanan baru*). Kaum *new right* di Korea Selatan ini bangkit pada awal tahun 2000-an pada masa pemerintahan Kim Dae-jung dan Roh Moo-hyun yang berhaluan liberal. Kelompok *new right* berasumsi bahwa sistem “demokrasi liberal” itu harus bersifat anti-komunisme dan berpandangan bahwa Korea Selatan harus melawan pengaruh Korea Utara dan Tiongkok, sekaligus juga memosisikan peran Amerika Serikat dan Jepang sebagai mitra kekuatan anti-komunis yang efektif (Yang, 2025). Terpilihnya Presiden Yoon sekaligus memberikan suara kepada kelompok *new right* yang bangkit dalam dinamika politik domestik Korea Selatan, termasuk memberikan dukungan kepada Yoon untuk memperbaiki hubungan Seoul dengan Tokyo (M. Lee & Yang, 2024).

Maka dari itu, Presiden Yoon kemudian bergerak untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Jepang di bawah Perdana Menteri Kishida Fumio pada tahun yang sama. Presiden Yoon dan Perdana Menteri Kishida bertemu saat KTT ASEAN di Kamboja berlangsung pada bulan November 2022, dan memberikan *joint statement* atau pernyataan bersama untuk mengecam provokasi Korea Utara, dan berjanji untuk bekerja sama secara trilateral antara Jepang, Republik Korea dan Amerika Serikat dalam meningkatkan kemampuan *deterrence* dan kerja sama keamanan kawasan dalam kerangka Indo-Pasifik (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022).

Secara historis, Korea Selatan mencoba untuk menghindari untuk bekerja sama dengan Jepang dan Amerika Serikat secara trilateral dalam bentuk kerja sama keamanan kawasan dalam kerangka Indo-Pasifik. Terutama lagi, penerapan kebijakan luar negeri Indo-Pasifik Jepang yang cenderung lebih bersifat proaktif dan *balancing* untuk melawan pengaruh Tiongkok dilihat oleh Korea Selatan untuk berpotensi mengantagoniskan hubungannya dengan Beijing di tengah *interdependence* atau saling ketergantungan yang dimiliki antara Korea Selatan dan Tiongkok secara ekonomis. Lantas, komitmen-komitmen yang dijanjikan oleh Presiden Yoon kepada Jepang dapat dipandang sebagai perubahan yang signifikan dalam hubungan antara Korea Selatan dan Jepang dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

K.J. Holsti pernah mendefinisikan reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara untuk mencoba untuk mengubah pola hubungan negaranya dengan negara lain. Bentuk reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri ini dapat dilihat dalam empat faktor penting; seperti tingkat keterlibatan eksternal, kebijakan-kebijakan mengenai sumber dan jenis penetrasi eksternal, arah keterlibatan eksternal tersebut, serta komitmen diplomatis atau militer yang ada (K. Holsti, 2016). Keempat faktor ini penting untuk melihat aksi, transaksi, dan komitmen Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon untuk melakukan reorientasi dan restrukturisasi ini terhadap Jepang.

Penelitian ini akan mencoba untuk meneliti dan menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan pada masa Presiden Yoon Suk-yeol yang mengedepankan *detente* atau perbaikan hubungan dengan Jepang. Dengan menganalisis kebijakan ini, penelitian ini berkontribusi kepada literatur yang ada mengenai kebijakan luar negeri dan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, serta dalam aspek politik luar negeri di Asia Timur. Meskipun telah ada beberapa literatur empiris sebelumnya yang membahas mengenai kompleksitas hubungan Korea Selatan dan Jepang, peneliti menemukan bahwa ada satu penelitian yang membahas hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam periode Presiden Yoon Suk-yeol, meskipun itu juga Penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan wawasan tentang rasionalitas dan *outlook* kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Yoon Suk-yeol untuk lebih mendekati Jepang di tengah kondisi politik domestik yang terpolarisasi. Ada pula signifikansi yang diberikan dalam penelitian ini adalah melihat mengapa kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol bergerak untuk memperbaiki hubungannya dengan Jepang, dan bagaimana respons yang diberikan dari kelompok pemangku kebijakan elit, pandangan

pemerintah Jepang dan aktor-aktor lainnya, serta opini publik Korea Selatan sendiri. Selain itu, ada juga signifikansi yang diberikan dalam penelitian ini adalah memberikan saran dan rekomendasi bagi pemangku kebijakan elit untuk memformulasi atau menyusun kebijakan luar negeri negaranya masing-masing.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian tersebut, peneliti dapat menyimpulkan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah; **bagaimana strategi reorientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon Suk-yeol dalam upaya untuk memperkuat hubungan dengan Jepang?**

1.3. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini akan difokus terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan dalam hubungan Jepang dan aspek Indo-Pasifik, serta dampak respons antara Jepang dan Korea Selatan yang dilakukan antara tahun 2022-2024. Alasan dari pembatasan kurun tahun dari 2022 hingga 2024 yang dilakukan oleh peneliti ini disebabkan kurun tahun tersebut adalah masa periode jabatan Yoon Suk-yeol sebagai presiden sebelum dimakzulkan setelah krisis darurat militer yang dilakukan pada bulan Desember 2024. Di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk-yeol tersebut, Korea Selatan mengalami perubahan dalam segi kebijakan luar negeri yang dilakukan terhadap Jepang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol dalam upaya reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negerinya dengan Jepang dalam sektor keamanan dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik, termasuk pengaruh internal dan pengaruh eksternal yang dipertimbangkan oleh Korea Selatan. Batasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah meliputi fokus terhadap ruang lingkup kebijakan luar negeri dan diplomasi. Fokus dalam lingkup keamanan dan ekonomi tidak akan menjadi fokus utama, namun aspek keamanan dipertimbangkan sebagai aspek yang minor.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Ada juga tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis latar belakang reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri yang di ambil oleh Korea Selatan di bawah pemerintahan Yoon Suk-yeol terhadap Jepang.
- 2) Menganalisis kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Korea Selatan yang berkaitan dan menonjolkan pendekatannya dengan Jepang.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Ada juga manfaat serta kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

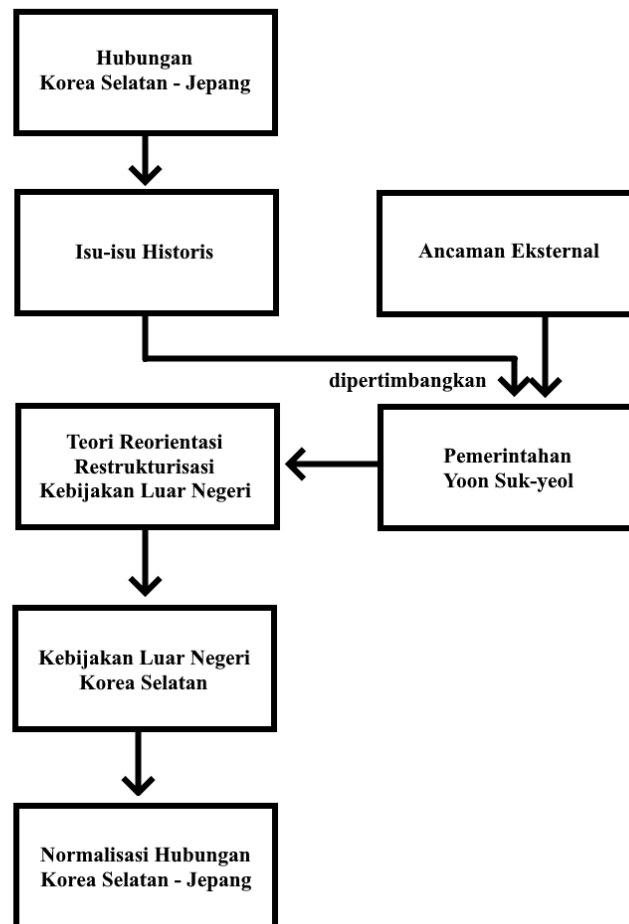
- 1) Memberikan pemahaman komprehensif mengenai penerapan analisis kebijakan luar negeri Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol.
- 2) Menjadi referensi bagi pengambil keputusan sebagai studi kasus dalam memahami alasan reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri.
- 3) Memenuhi syarat untuk mencapai kelulusan sarjana jurusan hubungan internasional.

1.4.3. Manfaat Akademis

Ada juga manfaat akademis yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menyediakan data empiris mengenai topik kebijakan luar negeri antara Korea Selatan dan Jepang.
- 2) Menjadi referensi penelitian lanjutan dalam bidang hubungan internasional dan kebijakan luar negeri.
- 3) Menganalisis implikasi reorientasi kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Jepang dalam segi positif.

1.5. Kerangka Teoritis-Konseptual



Gambar 1. 1. Kerangka Analisis Penelitian

Ada juga penjelasan teori yang diberikan penguraian kerangka analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

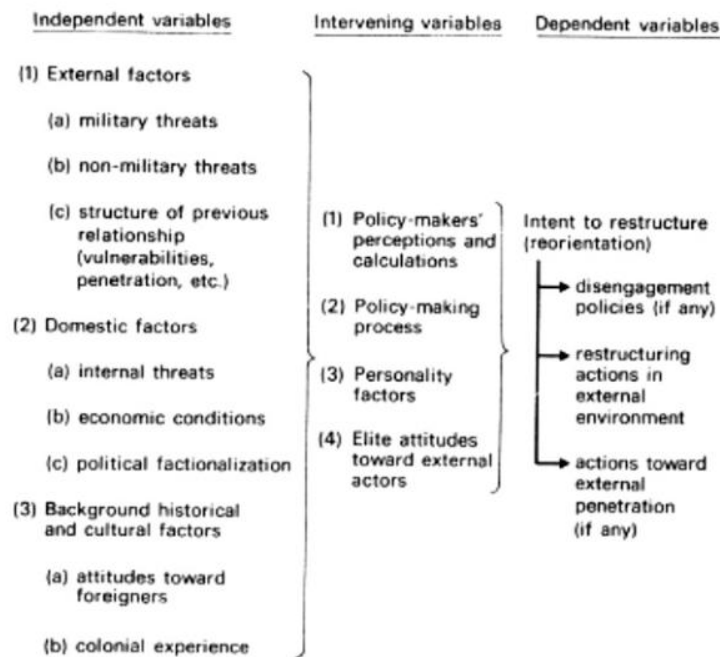
1.5.1. Teori Reorientasi dan Restrukturisasi Kebijakan Luar Negeri

Teori reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri adalah sebuah teori dalam studi hubungan internasional yang mempelajari jenis perilaku kebijakan luar negeri pemerintah suatu negara untuk mengubah pola hubungan eksternal mereka, bahkan secara total. Reorientasi ini dapat dijelaskan sebagai maksud dari pemangku kebijakan untuk merestrukturisasi hubungan negaranya dengan negara lainnya. Teori ini dibentuk oleh Kalevi J. Holsti untuk menjelaskan mengapa suatu negara mengubah kebijakan luar negeri mereka dalam kurun waktu yang sangat cepat, karena adanya perubahan pola hubungan eksternal yang dibangun untuk merespons terhadap kondisi dan peluang baru di lingkungan eksternal (K. Holsti, 2016).

Kalevi Holsti menjelaskan bahwa perbedaan reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri dapat dilihat berdasarkan empat faktor; seperti tingkat keterlibatan eksternal, kebijakan-kebijakan mengenai sumber dan jenis penetrasi eksternal, arah atau pola keterlibatan eksternal tersebut, serta komitmen diplomatis atau militer yang ada. Keempat faktor ini dapat dikategorikan menjadi empat tipologi reorientasi kebijakan luar negeri yang berbeda, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1 *Isolation* (isolasi). Tipologi ini dapat dilihat berdasarkan keterlibatan eksternal yang sangat minim, dan dipadukan dengan kebijakan luar negeri yang *exclusionist*. Komitmen militer dan diplomatik dihindari, serta arah transaksi eksternal dianggap tidak penting karena transaksi eksternalnya sudah minim, dan adanya sedikit pola dalam tindakan dan transisi suatu negara.
- 2 *Self-reliance*. Tipologi ini dapat dilihat dengan adanya hubungan perdagangan, diplomatik dan budaya yang telah diversifikasi, tapi tingkatannya masih tergolong rendah. Suatu negara pun menghindari pola hubungan yang menunjukkan suatu ketergantungan atau kerentanan, dan komitmen militer pun yang bersifat ketergantungan, seperti rentan terhadap diputusnya pengiriman pasokan senjata dihindari.
- 3 *Dependence*. Tipologi ini dapat dilihat dengan adanya transaksi dan aksi hubungan dalam tingkat tinggi, serta adanya pola hubungan yang ditujukan terhadap negara lain atau sekelompok negara yang mirip, seperti Uni Eropa. Kapabilitas ekonomi, teknis, komunikasi dan militer berasal dari negara lain. Suatu negara tersebut mengalami penetrasi tingkat tinggi oleh aktor eksternal dalam bentuk pasukan militer, pariwisata, investasi asing, komunikator, dan lain-lainnya. Keamanan pun disediakan oleh mentor kekuatan dengan adanya pangkalan militer.
- 4 *Non-alignment diversification*. Tipologi ini dikategorisasi dengan adanya kerja sama eksternal yang sangat ekstensif, tetapi arah dan polanya tersebar. Adanya penetrasi eksternal yang diseimbangkan oleh aktor negara untuk menyeimbangkan keanekaragaman negara yang bekerja sama. Aktor negara menghindari komitmen militer seperti aliansi dengan siapa pun.

Holsti juga menjelaskan ada tiga variabel untuk mencoba menjelaskan reorientasi kebijakan luar negeri; yaitu (a) *independent variable*, (b) *intervening variable*, dan (c) *dependent variable*. *Independent variable* atau variabel independen melihat adanya tiga faktor; faktor eksternal dalam bentuk ancaman militer, non-militer, dan struktur hubungan sebelumnya; faktor domestik seperti ancaman internal, kondisi ekonomi dan faksionalisasi politik; dan latar belakang historis dan budaya seperti perilaku terhadap orang-orang asing dan pengaruh kolonial. Variabel independen ini dipengaruhi oleh variabel *intervening*, yang disebabkan oleh empat faktor, yaitu persepsi pemangku kebijakan, proses pembuatan kebijakan atau *policy-making process*, faktor personalitas, dan perilaku kaum elit politik terhadap aktor-aktor eksternal. Apabila kedua variabel ini terpenuhi, maka keinginan untuk melakukan reorientasi atau restrukturisasi kebijakan luar negeri tercapai. Reorientasi atau restrukturisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan *disengagement*, restrukturisasi tindakan suatu negara di lingkungan eksternal, atau melakukan suatu tindakan terhadap penetrasi eksternal.



Gambar 1. 2. Pola Variabel Reorientasi Kebijakan Luar Negeri (K. Holsti, 2016)

Teori reorientasi dan restrukturisasi kebijakan luar negeri ini dapat juga digunakan untuk meneliti dan menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri Korea Selatan dapat memengaruhi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang. Apabila melihat dari ketiga faktor variabel independen, faktor eksternal seperti ancaman dari

Korea Utara dan Tiongkok serta struktur hubungan sebelumnya dengan Jepang yang bersifat antagonis. Faktor domestik Korea Selatan yang menunjukkan adanya faksionalisasi politik, utamanya dengan kebangkitan kelompok *new-right* yang mendorong Korea Selatan untuk lebih mendekati Jepang sebagai mitra keamanan untuk melawan pengaruh Korea Utara dan Tiongkok. Yoon Suk-yeol, mantan jaksa yang sangat dekat dengan gerakan konservatif *new-right* terpilih sebagai presiden, dan pemerintahannya mulai mengadopsi kebijakan luar negeri Indo-Pasifik versi Korea Selatan, serta Global Pivotal State-nya dalam waktu yang sangat cepat.

Teori ini akan membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam memperbaiki hubungannya dengan Jepang. Peneliti juga akan menggunakan variabel-variabel yang diberikan serta menetapkan atau meneliti jenis hasil tujuan atau *intent* dari restrukturisasi yang tercapai oleh Korea Selatan dalam berdasarkan kebijakan apa saja yang dilakukan dengan Jepang.

1.5.2. Kebijakan Luar Negeri

Foreign policy atau kebijakan luar negeri menurut kamus bahasa Inggris Cambridge dapat dijelaskan sebagai kebijakan suatu negara untuk berurusan dengan negara lain, dalam hal-hal yang menyangkut perdagangan atau pertahanan. Menurut Kalevi Holsti, kebijakan luar negeri adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara yang merupakan hasil *output* politik luar negeri dengan berlandaskan pemikiran, serta pola tindakan yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk menanggulangi permasalahan, mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional. Kebijakan luar negeri dirancang untuk mempertahankan atau mengubah suatu tujuan, keadaan atau praktik dalam hubungan eksternal. Mempertahankan atau mengubah kondisi dalam hubungan eksternal ini penting untuk mencapai kepentingan nasional seperti keamanan, otonomi, kesejahteraan dan prestis (Affianty, 2015).

Menurut James Rosenau, kebijakan luar negeri juga menyangkut kepada opini publik yang dapat menjadi parameter yang penting untuk melihat perubahan pandangan publik terhadap isu-isu kebijakan luar negeri tertentu. Maka dari itu, Rosenau memandang bahwa suatu pemimpin wajib untuk melihat sentimen opini publik terhadap kebijakan luar negeri negaranya, tetapi juga penting untuk

menyeimbangkan kepentingan nasional secara strategis dan tidak untuk melihat kebijakan luar negeri sepenuhnya berdasarkan opini publik sendiri (Rosenau, 1980).

Ada tiga perspektif utama dalam respons kebijakan luar negeri terhadap opini publik: pandangan tradisional yaitu konsensus Almond-Lippmann, *top-down* dan *bottom-up*. Menurut hasil pemaparan Ole Holsti terhadap pandangan yang dikemukakan oleh ilmuwan HI asal Amerika Gabriel Almond dan jurnalis Amerika Walter Lippmann, konsensus Almond-Lippmann memandang bahwa opini publik tidak boleh memengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri. Almond dan Lippmann memandang bahwa opini publik itu tidak konsisten dan jelas, tidak relevan karena publik tidak dapat memahami kebijakan luar negeri, dan dapat berubah secara cepat dan tidak pasti (O. R. Holsti, 2004).

Sementara perspektif *top-down* menjelaskan hubungan antara pemangku kebijakan politik elit di atas memengaruhi opini publik di bawah. Publik pun selaras dengan pandangan elit politik di atas dan mendukung kebijakan luar negeri yang akan dilaksanakan, dan disesuaikan berdasarkan garis partisan atau loyalitas. Ada juga pandangan *bottom-top* yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dibentuk oleh opini publik di bawah yang selalu berubah berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tingkat domestik atau internasional. Opini publik ini bertujuan untuk menekan elit politik di atas untuk mengubah kebijakan luar negerinya (Forsberg, 2024).

Konsep kebijakan luar negeri dapat digunakan untuk membantu melihat bagaimana Korea Selatan memandang upaya *decision-making* atau kebijakan luar negeri mereka untuk memperbaiki hubungannya dengan Jepang. Selain itu juga, kita juga dapat melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh Korea Selatan di bawah pemerintahan Yoon Suk-yeol dalam ambisinya untuk mencapai normalisasi hubungan dengan Jepang dan bagaimana perilakunya dalam menerima atau menanggapi opini publik Korea Selatan yang notabene memandang pemerintah Jepang secara negatif akibat isu historis yang belum terselesaikan.

1.5.3. Strategi Indo-Pasifik Korea Selatan

Strategi Indo-Pasifik Korea Selatan adalah strategi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Korea Selatan pada zaman pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol pada Konferensi Tingkat Tinggi Korea Selatan-ASEAN tahun 2022. Dalam strategi kebijakan luar negeri ini, Korea Selatan memandang stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik, yang berdasarkan norma-norma internasional dan *rules-based order* harus diwujudkan untuk menjalinkan perdamaian, kebebasan dan kemakmuran kawasan. (Government of the Republic of Korea, 2022)

Ada tiga perwujudan visi yang ingin dikumandangkan oleh pemerintah Korea Selatan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. ***Freedom* atau menjalinkan kebebasan** di kawasan dengan menjunjung tinggi norma-norma internasional dan *rules-based order* yang disokong oleh nilai-nilai universal seperti kebebasan, demokrasi, aturan hukum dan hak asasi manusia.
- b. ***Peace* atau menjaga perdamaian** di kawasan dengan menghindari persengketaan dan konflik bersenjata melalui resolusi dialog yang damai, maupun isu-isu keamanan tradisional dan non-tradisional. Isu-isu keamanan kawasan ini mencakup Korea Utara dan persenjataan nuklirnya, non-proliferasi senjata nuklir, *counter-terrorism*, keamanan maritim, keamanan siber dan kesehatan publik.
- c. ***Prosperous* atau membangun Indo-Pasifik yang makmur.** Visi ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dan demokratisasi ekonomi yang saling menguntungkan banyak pihak, sekaligus menjalin kerja sama yang memfasilitasi hubungan antar warga dan pertukaran budaya (Government of the Republic of Korea, 2022).

Prinsip-prinsip yang dipegang dalam strategi Korea Selatan ini terdiri dari tiga; yaitu inklusif, kepercayaan dan resiprokal. Strategi kebijakan luar negeri Korea Selatan bertujuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak mana pun yang memiliki nilai yang sama dengan Korea Selatan secara inklusif, membangun kerja sama melalui kepercayaan, dan menjalin hubungan resiprokal atau yang saling menguntungkan bagi semua pihak (Government of the Republic of Korea, 2022).

Dalam strategi kebijakan Indo-Pasifik ini, Jepang diakui sebagai mitra negara penting yang memiliki nilai yang sama untuk mewujudkan visi Indo-Pasifik Korea Selatan. Korea Selatan memandang kerja sama keamanan dalam bentuk trilateral dengan Jepang dan Amerika Serikat penting untuk menyelesaikan isu-isu seperti ancaman nuklir Korea Utara, gangguan terhadap *supply chain* atau rantai pasok, keamanan siber, perubahan iklim, krisis kesehatan dan isu-isu lainnya. Selain isu-isu keamanan, Korea Selatan melihat Jepang sebagai salah satu dari tiga negara di Asia Timur yang memiliki posisi ekonomi yang besar, dan mementingkan kerja sama trilateral antara Korea Selatan-Jepang-Tiongkok untuk mencapai keamanan dan stabilitas (Government of the Republic of Korea, 2022).

1.6. Asumsi / Hipotesis Penelitian

Ada juga asumsi atau hipotesis penelitian yang diberikan dalam penelitian ini adalah bahwa pemerintahan Presiden Yoon Suk-yeol mengubah kebijakan luar negerinya dalam bentuk normalisasi hubungan dengan Jepang sebagai tujuan untuk membangun gerakan bersama dalam prospek Indo-Pasifik sebagai respons seperti ancaman militer dari Korea Utara dan pengaruh *hard power* dan *soft power* Tiongkok yang menguat.